

Sahroni Bantah Tudingan Adam Deni soal Membungkam dengan Rp30 M

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni melaporkan lagi Adam Deni ke polisi soal tudingannya membungkam dengan uang Rp 30 miliar. Sahroni pun membantah dirinya melakukan pembungkaman seperti tuduhan Adam Deni.

"Terkait dengan polemik pemberitaan yang dikatakan Adam Deni kepada saya tentang membungkam dengan nilai Rp 30 M, itu saya bantah dan secara langsung saya laporkan kemarin," kata Sahroni dalam konferensi pers di Pave Bistro, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel), Jumat (1/7).

Sahroni mengatakan Adam Deni bisa berkata seenaknya jika tak dilaporkan ke polisi. Dia mengatakan media sosial tak boleh digunakan untuk membuat kegaduhan.

"Kalau tidak dilaporkan, maka dia akan mengeluarkan suara itu enak-enaknya. Saya aja memiliki medsos, itu saya jaga banget. Kenapa? karena untuk tidak membuat kegaduhan, dan untuk menjaga komunikasi di depan

publik," ujarnya.

Sahroni sebelumnya melaporkan Adam Deni ke Bareskrim Polri. Laporan tersebut dilayangkan terkait dugaan pencemaran nama baik. Sahroni menyebut dirinya dituduh membungkam sejumlah pihak dengan menerima uang senilai Rp 30 miliar.

Tudingan Adam Deni ke Ahmad Sahroni itu disampaikan di PN Jakarta Utara, Selasa (28/6). Pernyataannya disampaikan di luar proses persidangan.

"Seorang Adam Deni itu ditahan sangat mahal bisa lebih dari Rp 30 miliar. Karena apa? Penangkapan saya ini cepat, penanganan saya cepat, P21 saya cepat, tuntutan saya pun juga tinggi. Habis berapa puluh miliar Saudara AS untuk membungkam saya?" ujarnya sambil berjalan di area pengadilan.

"Nggak ada takut kenapa harus takut, orang ini kebenaran kok, kita sama-sama tahu, biarin aja," sambungnya saat ditanya apakah tidak takut tudingannya ini membuatnya bermasalah. ● han

2 Polhukam

FOTO: ANT



KUNJUNGAN MENPAREKRAF KE DESA WISATA BUGISAN

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno (kedua kanan) mengunjungi kompleks Candi Plaosan di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah, Jumat (1/7). Kunjungan kerja tersebut dalam rangka meresmikan Desa Bugisan sebagai 50 desa wisata terbaik pada Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022.

Kemenlu: Buruh Meninggal di Malaysia Jumlahnya 15 Orang, Ada Diskrepansi Data

Pemerintah Indonesia meminta Malaysia memberi perlakuan yang lebih baik terhadap buruh migran RI, utamanya soal kesejahteraan dan kesehatan.

JAKARTA (IM) - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengklarifikasi informasi yang menyebutkan ratusan buruh migran asal Indonesia yang meninggal dunia di Depot Tahanan Imigrasi (DTI) Sabah, Malaysia.

Lewat pertemuan itu, Kemenlu mendapat konfirmasi atas informasi yang beredar serta jumlah buruh migran yang tewas akibat beberapa hal.

"Memang kalau dari sisi jumlah ada data awal yang disebutkan oleh KBMB. Kurang lebihnya ada data yang kita minta klarifikasi kembali," ucap Faiza.

Kendati demikian dia menekankan, fenomena meninggalnya Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi buruh migran di luar negeri tetap menjadi perhatian serius pemerintah. Oleh karena itu dalam pertemuan, Indonesia meminta Malaysia melakukan

melakukan kroscek dan meminta klarifikasi melalui perwakilan RI di Kota Kinabalu dan Tawau dengan Pengarah Imigrasi Wilayah Sabah dan Jabatan Kesehatan Negeri Sabah (JKNS) Malaysia.

Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Hermono, berencana datang dari Kuala Lumpur ke Sabah untuk melakukan pendalaman terkait meninggalnya para buruh migran.

Selain mendalami, duta besar juga dijadwalkan membahas peristiwa ini dengan pihak-pihak terkait di Malaysia.

"Mudah-mudahan setelah pertemuan tersebut kita bisa mendapatkan konfirmasi berita yang lebih komprehensif lagi dari perwakilan kita di Malaysia. Namun pemerintah memberikan perhatian yang sangat serius atas permasalahan ini," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, 149 buruh migran asal Indonesia, disebut meninggal di dalam pusat tahanan imigrasi Sabah, Malaysia yang diduga diperalakannya tidak manusiawi dan dugaan kekerasan.

Menurut anggota Koalisi Buruh Migran Berdaulat, KBMB Abu Mufakhir, WNI yang ditangkal karena melanggar aturan imigrasi itu diduga hidup dalam kondisi tidak

layak dan tak punya akses ke kesehatan. Tim pencari fakta dari KBMB, menemukan selama 2021 hingga juni 2022, 149 WNI tewas di sejumlah WNI di Sabah, Malaysia. ● mei

MRP Sebut Pemerintah dan DPR Sepihak Bentuk Provinsi Baru di Papua

JAKARTA (IM) - Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib mengakuinya tak dapat berbuat banyak setelah DPR RI mengesahkan pembentukan 3 provinsi baru di Papua, yaitu Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan pada Kamis (30/6).

Pembahasan 3 undang-undang terkait 3 provinsi anyar ini pun dilakukan cukup cepat di DPR, dihitung hanya 2,5 bulan sejak rancangan undang-undang tersebut disahkan sebagai inisiatif parlemen pada 12 April 2022.

"Saya capek dan lelah," ujar Timotius dalam jumpa pers Koalisi Kemanusiaan untuk Papua, Kamis (30/6).

Secara konstitusional, MRP telah melakukan upaya maksimal untuk setidaknya menunda pemekaran Papua dengan mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) ke Mahkamah Konstitusi.

Gugatan itu dilayangkan karena dalam UU Otsus tersebut, DPR menetapkan bahwa pemekaran Papua bisa dilakukan sepihak oleh Jakarta, tanpa perlu menunggu persetujuan MRP sebagai lembaga negara representasi kultural orang asli Papua.

Padahal, keberadaan MRP merupakan roh dari pelak-

saan otonomi khusus di Papua, sebagai semangat desentralisasi dari pemerintah pusat ke wilayah otonomi khusus seperti Papua.

Sebelum direvisi pada 2021, pemekaran Papua hanya dapat dilakukan jika MRP telah memberi lampu hijau.

"Secara filosofis, UU Otsus itu punya sejarah. Otsus itu diberikan negara sebagai perekat atau win-win solution," ujar Timotius.

Pemekaran Papua selama ini dicurigai hanya menjadi kepentingan elite Jakarta maupun elite lokal Papua yang akan memperlebar jabatan di provinsi-provinsi baru kelak.

Simbiosis mutualisme ini pun ditengarai bakal menjadi pintu masuk bagi eksploitasi sumber daya alam Papua di masa depan serta memperburuk situasi kemanusiaan di sana, sehubungan dengan penambahan polda dan kodam.

"Ini bukan untuk kesejahteraan, tapi mendatangkan sebanyak-banyaknya militer di Tanah Papua untuk menguasai, datang seketika mengelola sumber daya alam Papua agar tidak ada orang yang menggangu," kata Timotius.

"Kiblat negara sudah di timur. Sumatera dan Kalimantan sudah habis, toh? Terakhir, ya, Papua sebagai masa depan Indonesia," ucapnya. ● han

Arizon Mega Jaya, Hakim Ad Hoc Tipikor MA yang Tidak Setuju Pemiskinan Koruptor

JAKARTA (IM) - Komisi III DPR menyetujui Arizon Mega Jaya sebagai hakim ad hoc tindak pidana korupsi (tipikor) pada Mahkamah Agung (MA). Ia dipilih para wakil rakyat usai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.

Arizon merupakan mantan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi Palembang. Saat menjalani proses seleksi wawancara pada akhir April 2022, menjawab pertanyaan seorang penalis, Arizon menyebut bahwa praktek korupsi dilakukan untuk memenuhi hasrat gaya hidup, bukan lagi kebutuhan.

Menurut dia, praktek korupsi merupakan manifestasi dari sifat kesalahan yang dilakukan oknum. Ia mengatakan, para pelaku korupsi ini bukanlah mereka yang belum memiliki rumah, tetapi

sudah banyak punya rumah.

Menurutnya, seseorang melakukan korupsi karena tamak. Ia pun tidak setuju pemiskinan Koruptor. Dalam kesempatan itu, Arizon juga menguraikan isu terkait pemiskinan untuk koruptor. Ia menilai bahwa tindakan tersebut tidak adil karena koruptor tersebut sudah kaya sebelum melakukan praktek korupsi.

Menurutnya, negara tidak perlu membalas dendam dengan cara-cara yang tidak beradab tersebut.

"Untuk terobosan itu ada, melalui putusan hakim. Kemudian dengan cara-cara dengan peraturan Jaksa Agung dan lain-lain. Jadi kita tidak serampangan kita merampas aset," kata Arizon, dikutip dari website komisiyudisial.go.id. ● mei



PENERAPAN KTP ELEKTRONIK DIGITAL

Warga menunjukkan KTP Elektronik digital melalui gawainya di Disdukcapil Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Jumat (1/7). Kementerian Dalam Negeri akan menerapkan KTP Elektronik dalam bentuk digital yang memiliki kode QR secara bertahap dan mulai diujicobakan di 58 kabupaten/kota.

KKP Penuhi Target 32,5 Juta Hektare Wilayah Konservasi Laut di 2030

JAKARTA (IM) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan 32,5 juta hektare wilayah konservasi dan pengelolaan kawasan perairan dapat terpenuhi di 2030 mendatang. Sehingga dapat memberikan kontribusi besar terhadap pemulihan laut dan ekosistem perairan.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Victor Gustaaf Manoppo di rangkaian konferensi kelautan dunia The 2nd Oceans Conference (UNOC) Lisbon, Portugal, Selasa (28/6).

"Hingga tahun 2021, kawasan konservasi perairan yang ada telah mencapai 28,4 juta hektare atau 8,7 persen dari total luas perairan Indonesia. Fokus utama kami tidak hanya terletak pada perluasan kawasan tapi juga meningkatkan efektivitas pengelolannya," kata Victor dalam keterangan tertulis, Jumat (1/7).

Ia menuturkan untuk mencapai target tersebut, KKP telah menyiapkan sejumlah strategi dan mener-

apkan peraturan perundang-undangan guna mendukung pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Tak hanya itu, pihaknya akan turut memberikan penghargaan kepada kawasan yang melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi perairan dan mengintegrasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke dalam dokumen perencanaan wilayahnya.

Victor menambahkan ada tiga poin utama mengembangkan kawasan tersebut. Pertama, berbagi rencana sebagai upaya untuk memperkuat proses perencanaan dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan. Kedua, berbagai investasi untuk mengurangi kesenjangan pendanaan dalam pengelolaan. Terakhir, berbagi tanggung jawab untuk mengurangi kesenjangan sumber daya manusia di kawasan tersebut.

"Sehingga, pada tahun 2030, kawasan konservasi perairan seluas 32,5 juta hektar tidak hanya ada di perairan, tetapi juga dapat dikelola secara berkelanjutan," katanya. ● han

Firli Bahuri Sebut KPK Butuh Tambahan 351 Orang Pegawai

JAKARTA (IM) - Ketua KPK Firli Bahuri mengungkap KPK masih membutuhkan tambahan pegawai sekitar 351 orang. Firli mengungkapkan, kebutuhan pegawai tambahan itu berdasarkan beban kerja KPK.

Hal itu disampaikan Firli usai rapat tertutup dengan Komisi II DPR, pada Kamis (30/6) malam. Firli mengatakan, di bidang sumber daya manusia (SDM) KPK memiliki sekitar 1626 pegawai, tetapi terdapat kebutuhan pegawai sekitar 1900 orang sehingga membutuhkan tambahan pegawai lagi.

"Kebutuhan sesuai dengan analisa beban kerja tahun 2020 kita butuh sekitar 1.900 lebih. Artinya, kita masih membutuhkan sumber daya manusia sekitar 351 orang. Itu di bidang SDM," kata Firli, di gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/6) malam.

Diketahui meski membutuhkan tambahan pegawai berdasarkan kebutuhan pada

tahun 2020, pada tahun 2021 lalu KPK memecat 57 pegawai tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam proses alih status pegawai menjadi ASN. Selain membahas SDM, Firli mengatakan rapat itu membahas sejumlah poin terkait dengan tata laksana kelembagaan, tentang sumber daya manusia, kerja pemberantasan korupsi, serta terkait dengan regulasi pasca revisi UU 19/2019.

Sementara itu, dari segi pemberantasan korupsi, Firli mengatakan KPK melakukan upaya pendidikan pencegahan korupsi kepada masyarakat dan partai politik. KPK mengajak parpol untuk terus memberantas korupsi.

"Dan hari ini kita terus gempur, kita ajak para partai politik untuk ikut serta memberantas korupsi melalui pendidikan politik cerdas dan berintegritas. Termasuk juga terkait dengan penindakan, pencegahan, itu yang kita lakukan," ungkapnya. ● han

Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia Setelah Mengalami Infeksi Paru

JAKARTA (IM) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo meninggal dunia. Tjahjo meninggal setelah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Abdi Waluyo karena penyakit paru-paru yang dideritanya.

Jenazah Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo dimakamkan di kompleks Blok Z, Taman Makam Pahlawan Kalibata. Upacara pemakaman dilakukan secara militer.

Pantauan di lokasi sekitar pukul 17.07 WIB, Jumat (1/7), tampak ambulans yang membawa peti jenazah Tjahjo Kumolo tiba di lokasi.

Peti jenazah Tjahjo Kumolo tampak diselimuti bendera Merah-Putih. Ambulans berisi peti jenazah langsung masuk ke area pemakaman. Mensesneg Pratikno menjadi irup upacara pemakaman jenazah Tjahjo Kumolo.

Tjahjo Kumolo diketahui sakit pertama kali dikonfirmasi oleh Politisi Senior PDI Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno, pada Jumat (24/6).

"Benar beliau sakit (di-rawat di RS). Kita doakan agar segera sembuh atau pulih," ujar Hendrawan, Jumat (24/6).

Keterangan Tjahjo sakit ini juga dikuatkan oleh pernyataan Ketua DPP PDIP Bidang Pemuda dan Olahraga, Eriko Sotarduga. Bahkan kesehatan Tjahjo pun dipantau langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.

Berdasarkan keterangan anak kandungnya, Rahajeng Widyaswari, Tjahjo Kumolo diketahui mengalami infeksi, yang menyerang hingga ke paru-paru.

Berdasarkan keterangan Rahajeng, kondisi kesehatan Tjahjo Kumolo sempat membaik. Namun, hari ini, Jumat (1/7), kabar duka itu datang.



Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo

Tjahjo Kumolo dinyatakan meninggal dunia.

Kabar meninggalnya Tjahjo dikonfirmasi oleh Politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasarihu.

"Iya begitu (tjahjo kumolo meninggal dunia) kita dapat dari pimpinan fraksi pak Bambang Wuryanto, Jam 11 tadi," jelas Masinton saat dihubungi, Jumat (1/7).

Rahajeng Widyaswari Dalam postingan di instagram story anaknya menulis kabar duka tersebut.

"Sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kepada Nya-lah kita akan kembali," tulis Rahajeng dalam postingannya.

Adapun postingan tersebut diunggah Rahajeng di akun klinik gigi yang dimilikinya di @gmpdentist.

Kiprah Tjahjo

Melansir dari tjahjokumolo.id, Tjahjo Kumolo lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 1 Desember 1957 atau meninggal di usia 64 tahun. Dia menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia sejak 23 Oktober 2019, pada

Kabinet Indonesia Maju.

Tjahjo sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia yang menjabat dari 27 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2019 pada Kabinet Kerja.

Tjahjo juga merupakan salah seorang politikus Indonesia dan terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia periode 2009-2014 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan wilayah pemilihan Jawa Tengah I dan sekaligus menjadi Ketua Fraksi PDI-P di DPR RI dan juga menjadi anggota Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, dan informasi di DPR RI.

Tjahjo Kumolo secara mengejutkan dipilih oleh Megawati Soekarnoputri sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan periode 2010-2015 yang pada periode sebelumnya duduk sebagai Ketua DPP Bidang Politik PDI-P.

Tjahjo Kumolo sebelumnya juga pernah tercatat sebagai Ketua Umum KNPI dan anggota Partai Golongan Karya. ● han

PENGUMUMAN

PT INDOSURYA ARTHA MANDIRI, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Bekasi, ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan akan melakukan perubahan pada Pasal 4 Anggaran Dasar.

Pengumuman ini dibuat guna memenuhi ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai pengurangan modal.

Jakarta, 2 Juli 2022
Direksi Perseroan
Alamat Korespondensi:
Komp Kodam Jaya, Kramat Jati,
Jakarta Timur.

PENGUMUMAN RENCANA PENGALIHAN SAHAM PT INDAH SEMESTA ALAM

Direksi PT INDAH SEMESTA ALAM berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan rencana pengalihan saham - sistem Perseroan yaitu AHMAD SYAFIUDIN dan ANANG yang dilakukan oleh PT. TUNAS NUSANTARA EDUKASI sehingga susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

PT. TUNAS NUSANTARA EDUKASI sebanyak 1.999 saham
ANANG sebanyak 1 saham

Dengan adanya pengalihan saham tersebut tidak mengakibatkan perubahan status, hak dan kewajiban karyawan Perseroan.

Pihak-pihak yang berkepentingan/keberatan atas pengalihan saham tersebut dapat menyampaikan keberatan tertulis kepada:

PT. INDAH SEMESTA ALAM
di Gedung Menara SILMA BLOK 2 Lantai 12,
Jalan HR. Rasuna Said Kav 6, Rukan Telaga 00,
Rukan Warga 00, Kuningan Timur, Kecamatan Setra Budi,
Jakarta Selatan

U.p.a. Direksi

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 127 Ayat 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 2 Juli 2022
PT. INDAH SEMESTA ALAM
Direksi